

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi yang sampai saat ini belum mendapatkan solusi yang tepat dalam meminimalisirnya. Kemiskinan terus menjadi masalah bagi pembangunan dan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan pembangunan acapkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan (Suryahadi & Sumarto, 2001). Masalah ekonomi ini hampir dirasakan oleh seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia. Kemiskinan sendiri didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tersebut meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran (Kuncoro,2000; Tyas,2016).

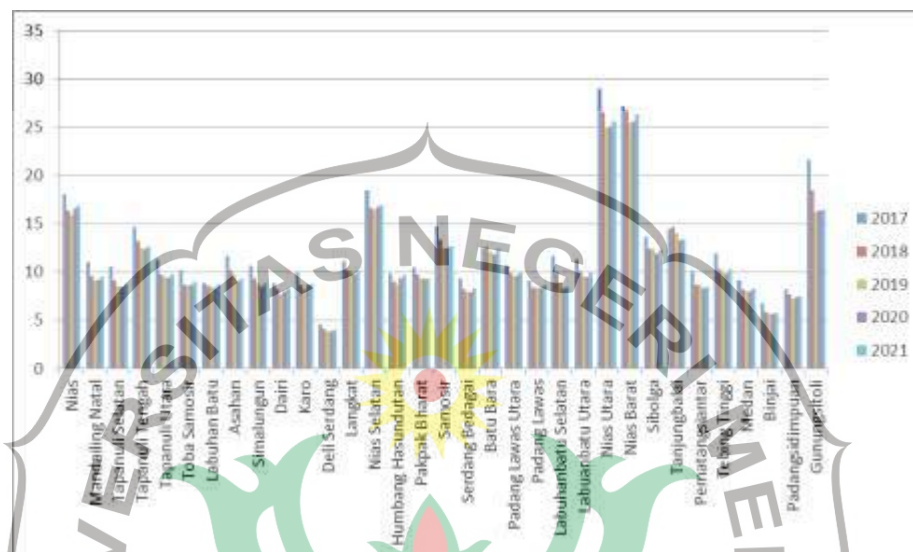
Provinsi Sumatera Utara dengan total kabupaten/kota yaitu sebanyak 33 kabupaten/kota merupakan provinsi ke empat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Oleh sebab itu, Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan salah satu permasalahan terbesarnya ialah tingkat kemiskinan. Dan di tahun 2022, provinsi Sumatera Utara menempati wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak ke-4 di Indonesia dengan total jumlah penduduk

miskin tercatat ada 1.262.090 jiwa pada bulan September 2022 (BPS,2022).Walaupun jumlah penduduk miskinnya berkurang dari tahun sebelumnya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara periode 2017-2021 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi. Fluktuasi yang terjadi pada persentase penduduk miskin di Sumatera Utara ini juga dibarengi dengan persentase penduduk miskin masing-masing kota/kabupaten. Dimana masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Utara memiliki tingkat kemiskinan yang berfluktuasi setiap tahunnya. Dengan persentase penduduk miskin terbesar di Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2017-2021 berada di Kabupaten Nias Utara.

Persentase penduduk miskin yang berfluktuasi ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga masih banyak orang yang menganggur dan masih banyak pekerja yang digaji rendah, serta masalah pembangunan yang tidak merata. Selain itu, pemerintah juga sudah berupaya mengurangi jumlah penduduk miskin dengan berbagai program namun belum mencapai hasil maksimal dan belum sesuai dengan harapan (Nasution & Tambunan,2022).

Untuk melihat sebaran tingginya tingkat persentase penduduk miskin di 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2021, dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 1.1 Diagram Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021

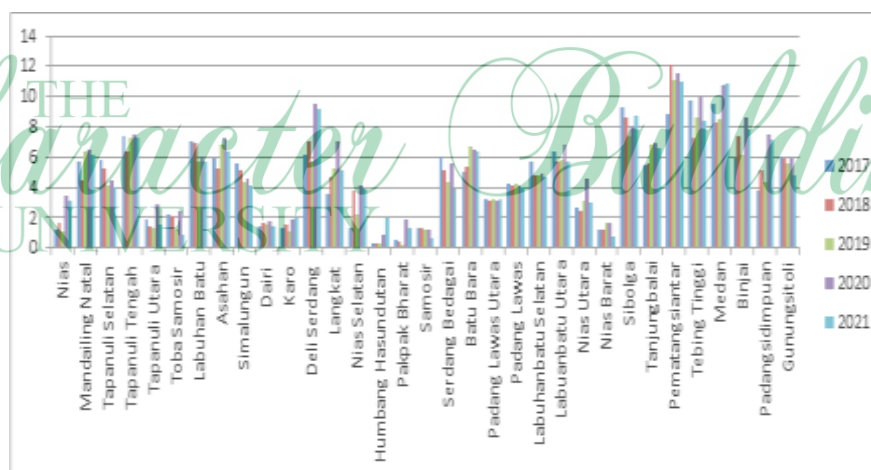
(Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumut)

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa tingkat persentase penduduk miskin di 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Hal ini dibuktikan salah satunya dengan diagram persentase penduduk miskin tertinggi yaitu di daerah Kepulauan Nias.

Dimana dapat dilihat bahwa dari lima tahun yaitu 2017-2021 Nias Utara merupakan kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Sumatera Utara. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumut merilis kabupaten/kota dengan tingkat presentase kemiskinan tertinggi yaitu Kabupaten Nias utara dengan 29,06 persen yaitu 381.696 jiwa pada tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh distribusi barang yang tidak merata serta masih minimnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dan tingkat pembangunan manusia yang masih rendah sehingga menyebabkan tingginya masyarakat yang menganggur dan

mengakibatkan tingginya persentase jumlah penduduk miskin pula. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Zebua et al., 2022) yang menyatakan bahwa ditinjau Nias merupakan daerah yang rentan dengan kemiskinan. Dari persentase penduduk miskin di Kepulauan Nias dapat ditemukan bahwa 4 kabupaten dan 1 kota di Kepulauan Nias memiliki rata-rata angka persentase penduduk miskin sebesar 20.1 persen. Apabila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di tingkat Provinsi Sumatera Utara pada periode yang sama yakni sebesar 8.8 persen, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh daerah di kepulauan Nias merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di Provinsi Sumatera Utara.

Tingkat pengangguran merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin (Ramdani,2015). Untuk melihat sebaran tingginya tingkat pengangguran di 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2021, dapat dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini :



Gambar 1.2 Diagram Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021

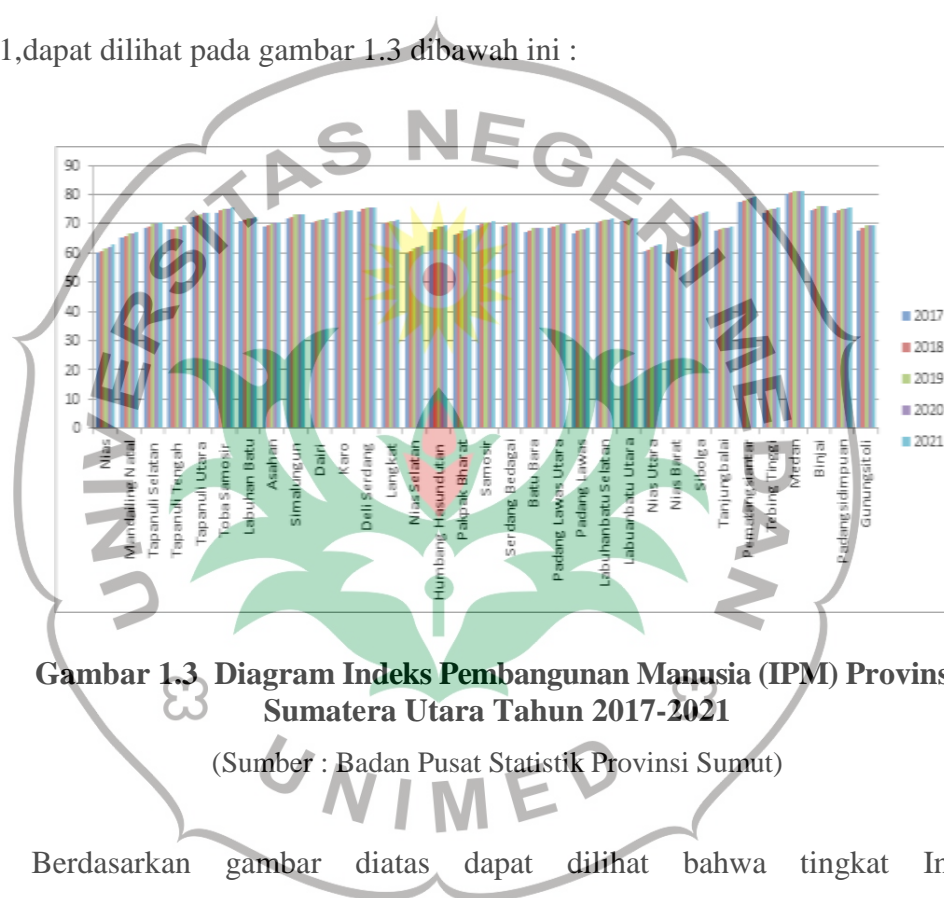
(Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Sumut)

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa tingkat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Diketahui pula berdasarkan diagram diatas bahwa tingkat pengangguran tertinggi provinsi sumatera utara tahun 2017-2021 berada di daerah pematang siantar

Terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi penyebab utama terjadinya pengangguran dan berdampak langsung pada tingginya kemiskinan (O'Campo et al., 2015). Sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Priseptia & Wiwin (2022) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran suatu daerah maka akan semakin tinggi pula jumlah kemiskinan di daerah tersebut. Senada dengan teori Sukirno (2011) bahwa efek negatif dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat dan pada akhirnya terjadi penurunan kesejahteraan masyarakat yang memungkinkan jatuh ke dalam perangkap kemiskinan.

Selain itu, persentase penduduk miskin yang tinggi disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu rendahnya indeks pembangunan manusia dan tingginya jumlah pengangguran. Hal ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian Larasati Prayoga et al. (2021) menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja.

Untuk melihat sebaran tingginya tingkat IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2021, dapat dilihat pada gambar 1.3 dibawah ini :



Gambar 1.3 Diagram Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021

(Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumut)

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Selain itu pula berdasarkan diagram diatas, dapat dilihat bahwa tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2017-2021 berada di daerah Nias lebih tepatnya Nias Selatan diikuti dengan Nias Utara dan Nias Barat. Hal ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pasaribu et al.(2022) yang menemukan bahwa jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara dipengaruhi kuat oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penurunan kemiskinan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

menunjukkan bahwa naiknya tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan kualitas SDM yang lebih tinggi yang mengarah pada peningkatan produktivitas angkatan kerja penduduk, yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan pendapatan.

Dengan pendapatan lebih, orang dapat memenuhi kebutuhan mereka dan mengurangi kemiskinan. Pada tahun 2017 Kota Sibolga merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara yang jumlah penduduk miskinnya paling rendah, dan di tahun yang sama indeks pembangunan manusia Kota Sibolga berada di rentang 60-79 atau kategori sedang (UNDP). Hal ini didukung oleh penelitian Pratama (2022), yang menyatakan bahwa kualitas pendidikan di Kota Sibolga cenderung semakin membaik seiring dengan kinerja pemerintahan Kota Sibolga yang terus menunjukkan kemajuan dari waktu ke waktu. Sehingga dengan meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Kota Sibolga, akan mendukung meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menurunkan jumlah penduduk miskin.

Hal ini juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Jhigan(2000), bahwa tiga ciri utama negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling terkait pada kemiskinan. Pertama, prasarana dan sarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki ketarampilan maupun keahlian. Ciri kedua, sarana kesehatan dan pola konsumsi yang buruk sehingga hanya sebagian penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah usang dan ketinggalan zaman.

Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious cycle of poverty*) yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse (1953). Secara garis besar teori tersebut mengemukakan bahwa kemiskinan tidak mempunyai ujung dan pangkal dan semua unsur yang menyebabkan kemiskinan akan saling berhubungan. Dalam teori lingkaran setan kemiskinan disebutkan bahwa rendahnya produktivitas disebabkan adanya ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, dan ketertinggalan, serta kurangnya modal. Melalui lingkaran setan kemiskinan tersebut, Ragnar Nurkse juga menjelaskan bahwa kemiskinan (ketidaksejahteraan) dan ketidaksempurnaan pasar menyebabkan rendahnya produktivitas. Produktivitas yang rendah menyebabkan pendapatan masyarakat menurun sehingga hal ini pada akhirnya juga menyebabkan tabungan dan investasi berkurang. Berkurangnya investasi berakibat pada rendahnya modal. Rendahnya modal akan menyebabkan ketidaksempurnaan pasar dan terjadi keterbelakangan. Hal tersebut terus bergerak melingkar sehingga tidak mempunyai ujung dan pangkal. Hal ini juga didukung oleh pendapat Mudrajat (2006) bahwa adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan menyebabkan rendahnya pula tabungan. Rendahnya tabungan maka rendah pula investasinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan

Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Angka pengangguran terbuka yang meningkat tidak hanya mengakibatkan masalah dibidang perekonomian, tetapi juga menimbulkan masalah di berbagai aspek sosial lainnya seperti masalah kemiskinan dan bahaya sosial lainnya.
2. Indeks pembangunan manusia (IPM) di 33 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara terus berfluktuasi namun pergerakannya lambat dalam beberapa tahun terakhir.
3. Kemiskinan di 33 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2017 sampai tahun 2021.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu hanya berfokus pada permasalahan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara tahun 2017-2021. Adapun data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah data sekunder yakni data tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk miskin provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2021.

1.4 Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Apakah Tingkat Pembangunan Terbuka (TPT) berpengaruh terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara tahun 2017-2021?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara tahun 2017-2021?
3. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara tahun 2017-2021?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh terhadap kemiskinan di Sumatera Utara tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara tahun 2017-2021.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait kajian yang diteliti.

2. Bagi Masyarakat dan Pemerintah

Dapat menjadi pedoman bagi masyarakat atau pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara dalam menentukan kebijakan dan keberlanjutan terkait dengan kajian yang diteliti.

3. Bagi Akademisi

Sebagai bahan referensi terutama bagi kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi.

THE
Character Building
UNIVERSITY